

Bagian 1

Semua Karena Cinta

Bagian pertama ini adalah pandangan Said Iqbal (Presiden KSPI) tentang mengapa kita harus berpolitik. Pandangan beliau menjadi ruh dan nafas perjuangan. Menjadi penyemangat bagi buruh Indonesia untuk terus bergerak dan berjuang.

Mengapa KSPI berpolitik?

Mengapa harus memberikan dukungan kepada Prabowo – Hatta?

Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan singkat. Ada proses panjang yang menjadi latar belakang, mengapa KSPI akhirnya mengambil keputusan itu. Banyak perdebatan yang dilakukan. Berbagai diskusi, seminar, dan kajian yang mendalam sudah diselenggarakan. Semua rangkaian itu, kami di KSPI menyebutnya sebagai upaya untuk menata ulang Indonesia: *mewujudkan negara sejahtera*.

Dalam banyak kesempatan, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, bahwa dirinya sangat optimis pada satu titik tertentu buruh akan menjadi penentu bagi terwujudnya kesejahteraan di negeri ini. Optimisme dan semangat Said Iqbal menular. Kami pun tersemangati. Bekerja dengan keras untuk membuktikan bahwa kata-kata itu bukan sekadar retorika.

“Buruh yang memiliki kesadaran idiologis, tidak ingin selamanya hanya menjadi penonton,” saya ingat, pernyataan ini disampaikan Said Iqbal dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa FISIP UI, di Depok.

Dengan kata lain, buruh harus ikut serta menjadi penentu bagi arah pembangunan.

Faktanya, ekonomi bisa tumbuh seperti yang kita nikmati sekarang, tidak bisa lepas dari peran buruh. Tanpa buruh, pilar-pilar ekonomi akan roboh. Mesin-mesin tidak bisa bergerak sendiri. Kendaraan tidak bisa berjalan tanpa kemudi.

Manusia adalah manusia, yang tak akan mungkin tergantikan keberadaannya. Ini artinya, buruh adalah pelaku utama dalam sebuah pembangunan. Sama pentingnya dengan keberadaan pengusaha dan elemen masyarakat yang lainnya.

Rasanya hanya di Indonesia (dan negara berkembang), posisi buruh yang penting itu direduksi. Buruh hanya sekadar menjadi objek dari sebuah proses produksi. Ia tidak lagi ditempatkan sebagai subjek.

Berkaca pada sejarah, berdirinya republik ini tidak lepas dari keberadaan kaum buruh. Salah satu yang berani meneriakkan revolusi secara radikal adalah gerakan buruh. Kita pernah mengenal nama-nama hebat seperti Suryopranoto, Haji Agus Salim, hingga Tan Malaka. Nama-nama itu memiliki idiologi buruh.

Inilah yang kita lakukan sekarang. Mengembalikan gerakan buruh yang idiologis. Sesuatu yang pernah ada di negeri ini, tetapi sekian lama menghilang.

Kalau Anda hanya melihat hari kemarin (orde baru), maka bisa jadi benar, bahwa posisi buruh tidak menjadi penting. Ia hanya menjadi sekrup pembangunan. Dibutuhkan

saat pemilu sebagai *vote gater*, kemudian ditinggal dan dipunggungi ketika pemilu selesai.

“Dalam konteks kekinian dan ke depan, saya termasuk orang yang sangat optimis. Kaum buruh akan menjadi penting,” demikian kata Said Iqbal.

Partai Buruh Harus Lahir dari Kepentingan Kaum Buruh

Said Iqbal memberi catatan, pada saat Pemilu 1999, terdapat empat partai buruh yang ikut Pemilu. Partai Solidaritas Pekerja, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia. Pemilu 2004, ada dua partai buruh yang menjadi peserta. Mereka adalah Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Dalam Pemilu 2009, tinggal tersisa satu Partai Buruh. Tahun 2014, tidak ada satu pun partai buruh yang ikut pemilu.

Partai yang menamakan dirinya sebagai partai buruh dan pernah ikut dalam Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah partai nol koma. Karena, memang, suara yang mereka dapatkan hanya nol koma sekian persen. Menjadi partai yang dikesampingkan dan tidak dijadikan pilihan, bahkan oleh kaum buruh itu sendiri.

Kritik Said Iqbal terhadap partai buruh yang pernah ada dan kemudian gagal, karena partai itu lahir dari elite buruh.

Menurut Iqbal, mereka tidak melibatkan konstituen yang lebih luas. Tidak pernah bertanya kepada kaum buruh, apakah sesungguhnya buruh membutuhkan sebuah partai politik? Untuk bisa menjadi partai buruh yang kuat, yang

dibutuhkan bukan sekadar elite buruh yang bergerak. Tetapi semua element yang bergerak.

Ketika kemudian pada tahun 2014 ini tidak ada lagi partai politik yang berbasis buruh, Iqbal percaya hal itu bukan karena buruh trauma untuk mendirikan partai politik. Ini semacam jeda perenungan. Satu saat nanti, Iqbal sangat optimis akan lahir sebuah partai politik yang penyokong utamanya adalah kaum buruh.

Satu hal yang menarik untuk dicermati, meskipun tidak ada partai politik yang berbasis buruh, bukan berarti kaum buruh menjadi apolitis. Menurut Said Iqbal, masih ada pilihan yang bisa dilakukan sekarang. Pilihan pertama, buruh memberikan konsep atau isu-isu perjuangan kepada partai politik tertentu. Ada semacam kontrak politik, sehingga isu-isu kaum buruh bisa menjadi agenda yang juga diperjuangkan oleh partai tersebut.

Pilihan kedua, dengan menempatkan perwakilannya ke beberapa partai politik. Inilah yang dilakukan KSPI. Kader-kader KSPI menyebar ke beberapa partai politik. Dengan demikian, kita berharap isu perjuangan serikat buruh bisa dieksekusi oleh kader buruh yang nantinya duduk di parlemen melalui beberapa partai politik tadi.

Iqbal berpendapat, cara-cara seperti ini haruslah bersifat sementara. Tidak boleh selamanya kaum buruh menitipkan suaranya kepada partai lain. Oleh karena itu, mendirikan partai politik adalah langkah penting yang harus diupayakan.

Dalam pandangan Iqbal, mendirikan partai politik tidak bisa dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok orang lalu mengadakan deklarasi. Jika itu yang dilakukan, pasti yang kita terima adalah sebuah kegagalan.

Seperti ketika serikat buruh di Inggris dan Australia mendirikan partai buruh, ketika DGB menjadi penyokong utama partai politik di Jerman, atau korelasi politik ketika serikat buruh di Jepang mendukung partai, bahkan yang terjadi di Malaysia ketika serikat buruh di negara itu melakukan penetrasi politik dengan mendukung partai oposisi. Seperti itulah kita akan mendirikan partai. Semua berawal dari keinginan buruh (bukan elite) untuk terlibat dalam proses politik.

Tetapi harus dicatat, serikat buruh harus tetap independen. Perjuangan di tingkat pabrik tidak bisa ditinggalkan. Ia berpolitik atas dasar untuk memperjuangkan kepentingannya, bukan sekadar menjadikan buruh sebagai pendulang suara.

Kriteria Presiden Pilihan Buruh

Pemilihan legislatif dan presiden menjadi momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Tak terkecuali bagi kaum buruh. Pemilu bukan saja menentukan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin. Pemilu, juga menjadi pertarungan atas berbagai kepentingan. Kepentingan buruh harus mendapatkan prioritas dalam Pemilu tahun 2014 ini.

KSPI berpendapat, jaminan pensiun wajib bagi seluruh buruh per 1 Juli 2015 sebagaimana amanat UU BPJS adalah hal mutlak yang harus dijalankan. Saat ini hanya 0,05 persen buruh yang mempunyai jaminan pensiun. Dengan kata lain, 99,95 persen buruh tidak mempunyai jaminan pensiun. Sehingga ketika buruh dipecat dari perusahaan, meskipun sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun, ia akan kehilangan masa depan. Situasi ini sangat tidak ideal bagi buruh. Sudah bekerja dengan upah yang murah, setelah

mereka tidak bekerja, tidak ada jaminan pensiun.

Di samping ingin memastikan pada pertengahan tahun 2015 mendapatkan jaminan pensiun, kita juga ingin calon Presiden yang berorientasi kepada peningkatan daya beli masyarakat. Caranya, melalui kebijakan penetapan upah layak yaitu dengan cara mengubah 60 item KHL (kebutuhan hidup layak) menjadi 86 item KHL. Dalam 60 item KHL yang saat ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan upah minimum, terdapat item yang tidak masuk akal. Mana mungkin buruh dalam satu bulan mengonsumsi beras hanya 10 kilogram, 5 potong ikan segar, 3/4 kg daging, tidak mempunyai televisi, tidak membeli bedak (untuk buruh perempuan), dan lain-lain.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan upah layak tersebut, maka di tahun 2015 upah minimum harus naik sebesar 30 persen. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan upah. Untuk masuk dalam kategori

Presiden KSPI, Said Iqbal.

(Foto: Rohman)



negara maju, maka upah buruh di Indonesia harus dinaikkan secara signifikan.

Jika ada calon presiden yang bersedia memperjuangkan isu itu, buruh akan mendukungnya. Dukungan itu disampaikan secara terbuka pada saat perayaan *mayday*. Ini akan menjadi babak baru, di mana buruh Indonesia tidak lagi menjadi penonton. Buruh akan tampil ke depan untuk ikut serta menentukan arah pembangunan bangsa, menuju Indonesia sejahtera bagi semua. Bukan kesejahteraan bagi sekelompok elite saja.

Bukan hanya jaminan pensiun dan upah yang diperjuangkan. Setelah melakukan kajian, ternyata ada sepuluh isu penting yang menjadi perjuangan serikat buruh. Kelak, sepuluh isu ini disebut sebagai sepuluh tuntutan buruh dan rakyat (Sepultura).

Indonesia Bukan Hanya Milik Orang Kaya

“Kamu boleh kaya. Kamu boleh untung. Pabrik boleh dibangun. Investasi boleh masuk ke negeri ini. Ekonomi boleh tumbuh. Tetapi secara bersamaan, kamu tidak boleh memiskinkan kaum buruh.” Ini adalah pernyataan Said Iqbal yang sangat terkenal. Banyak di antara kami hafal kalimat itu. Di luar kepala.

Rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang direndahkan dengan sistem kerja *outsourcing* dan upah murah. Adanya jurang pemisah antara orang kaya dan miskin yang makin lebar. Tidak adanya persamaan hak bagi warga negara. Semua ini membuat resah. Resah bukan ingin menyerah. Tetapi keresahan yang membuat darah mendidih. Tidak sabar ingin segera melihat semua diskriminasi dan ketidakadilan itu berakhir.

“Itulah sebabnya, KSPI mengambil sikap yang tegas. Selalu bersemangat dalam mengorganisir kekuatan kaum buruh. Bahagia ketika melakukan perlawanan. Kami tidak peduli mau dibilang setan, hantu, atau apa pun itu. Yang kami peduli adalah tiga hal ini: keadilan, kemanusiaan, dan persamaan,” demikian Said Iqbal menegaskan.

Presiden KSPI, bahkan secara terang-terangan berani melakukan kritik tajam kepada Jokowi, saat Gubernur DKI Jakarta itu menetapkan upah murah pada tahun 2014. Saya tahu, kritik itu bukan didasarkan pada kebencian sebagai pribadi. Dalam konteks itu, Said Iqbal sedang menyuarakan suara ratusan ribu buruh DKI Jakarta yang tidak puas atas kinerja orang nomor satu di Jakarta itu.

“Selama para pemimpin itu tidak berpihak kepada rakyat kecil, kita akan menolak untuk diam. Kritik kita akan tetap tajam!” Tegasnya.

Jika Soekarno disebut sebagai penyambung lidah rakyat, rasanya tidak berlebihan jika kepada Said Iqbal kita menyebutnya sebagai penyambung lidah buruh.

Suatu ketika, di media, ada yang memberitakan buruh sudah bisa beli motor ninja. “Itu tanda buruh sudah sejahtera. Buruh tidak lagi miskin,” kata mereka.

Sedih membaca berita itu. Seolah-olah dengan nominal yang ada sekarang, gaji buruh sudah cukup tinggi. Tidak perlu naik lagi.

Kita sedih bukan karena buruh tidak boleh memiliki motor. Kita sedih, karena sesungguhnya yang harus didapat buruh lebih dari sekadar motor. Seandainya ada transportasi publik yang layak dan murah, buruh pasti akan berpikir dua kali ketika hendak membeli motor.

Jika saja mereka tahu, buruh bisa membeli motor setelah mengambil porsi yang besar dari upahnya. Buruh

berhemat untuk kredit motor, yang seharusnya dengan uang itu mereka bisa makan dengan layak. Anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Tetapi ia rela menyisihkan itu semua untuk membayar cicilan motor. Karena kalau ia naik angkot, naik ojek, gajinya bisa habis untuk membayar transportasi.

Buruh membeli motor karena pemerintah tidak memiliki kebijakan publik. Transportasi mahal. Harga rumah mahal. Akhirnya mereka berhemat dengan membeli motor, meskipun dengan cara mencicil.

Terkait dengan hal ini, Said Iqbal pernah mempertanyakan. Mengapa kalian tidak pernah mempersoalkan para pengusaha, dari mana mereka mendapatkan uang untuk hidup mewah? Jika kalian tahu, mereka bisa hidup mewah dari 'menghisap' keringat buruh-buruhnya yang bekerja sepanjang waktu!



**Rapat pimpinan FSPMI tanggal 15-17 Februari 2014,
memutuskan untuk terlibat aktif dalam Pemilu 2014.**

(Foto: Kristian Lelono)

Kami tidak heran ketika mereka kaget dengan gerakan kaum buruh semakin menguat dan mulai berani menggugat. Karena zona nyaman mereka sudah terusik. Apalagi, selama ini mereka memberikan kesejahteraan buruhnya dengan minim.

Mereka tidak pernah memberikan pensiun kepada buruh-buruhnya. Karena itulah, kita mempertanyakan perusahaan-perusahaan besar itu. “Mengapa kalau kamu investasi di Singapura, kamu bersedia membayar pensiun kepada buruh di sana? Kalau kamu investasi di Thailand, kenapa kamu mau membayar pensiun buruh di sana? Tetapi begitu kamu datang ke Indonesia, mengapa kamu tidak mau membayar pensiun?”

“Karena tidak ada aturan yang mewajibkannya,” kira-kira, seperti inilah jawaban mereka.

Kalau alasannya tidak ada aturan yang mewajibkan pengusaha harus membayar pensiun, untuk apa kamu datang ke negara kami? Berarti kamu hanya memanfaatkan kelemahan negara kami! Kamu datang hanya untuk mengeksploitasi negeri ini!

Atas dasar hal-hal seperti itulah kita tetap tegak berdiri. Buruh Indonesia mempunyai gagasan dan cita-cita. Republik ini bukan hanya milik pengusaha dan orang kaya. Kaum buruh, orang-orang kecil seperti kita, juga mempunyai hak yang sama untuk bisa sejahtera.

Sesungguhnya negeri ini bukanlah negeri yang miskin. Negeri ini adalah sebuah negeri yang nilai kekayaannya nomor lima belas se-jagad raya. Bahkan, pada tahun 2025 nanti, Indonesia diprediksi akan menjadi negara terkaya nomor sepuluh. Memasuki tahun 2030, kekayaan Indonesia menempati peringkat enam atau tujuh dunia. Kekayaan